

BAB V

Kesimpulan

Satu rintangan besar terhadap proses perdamaian di Sudan adalah berasal dari kebijakan yang dibuat oleh Amerika terhadap Sudan, kebijakan yang didasarkan pada bukti yang dimiliki sendiri yang tidak akurat terhadap perihal Sudan. Kebijakan ini dibentuk secara turun temurun dari pemerintahan Jimmy Carter sampai sekarang. Puncak dari kebijakan Sudan, ketika Presiden Bush menandatangani sebuah hukum Perjanjian Damai Sudan (*Sudan Peace Act*) pada 21 Oktober 2002.

Contoh yang lebih eksplisit yang menggambarkan kekeliruan, penyimpangan dan pengaturan yang didasarkan pada buruknya informasi akan semakin sulit kita temukan. Adanya persetujuan dimana hanya sekedar *lip service*, pernyataan yang bersifat omong kosong belaka agar terciptanya sebuah prasarat bagi sebuah proses negosiasi, penyelesaian secara damai dari perang di Sudan pada saat yang sama menyajikan satu sisi yang lain dari sebuah konflik dengan dana bantuan ratusan dolar.

Satu bentuk bantuan yang diselewengkan untuk menyokong pasukan dan membeli persenjataan. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah perjanjian yang mengutuk manipulasi dan penyelewengan terhadap 2/3 bantuan asing. Sebuah perjanjian yang menentang kekejaman terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Sudan. Tetapi juga menyediakan ratusan juta dolar untuk mereka yang dituduh

Selama lebih dari 12 tahun terutama berada dibawah pengawasan operasi standar *Life Line Sudan* PBB. Sudan telah menerima lebih dari milyaran dolar bantuan kemanusiaan. Bantuan yang sangat efektif untuk menyelamatkan kehidupan dalm penyelesaian konflik. Namun ternyata dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan besar – besaran. Bantuan ini tidak mencapai sasaran yang tepat, karena tidak sampai ditangan pengungsi konflik yang kelaparan namun menjadi sumber dana kelompok opsisi SPLA. Satu bentuk sumber dana yang memberikan pengaruh besar pada cadangan materi maupun kekluatan militernya.

Dalam kondisi konflik, hal tersebut dapat ditempuh dalam dua cara : *Pertama*, melalui pencurian yang tidak terdokumentasikan dalam skala besar. Dan pengalihan dari uang dan sumber daya fisik. *Kedua*, melalui legitimasi dari pihak – pihak yang berperang di bawah pengawasan dimana bantuan tersebut didistribusikan.

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika tidak hanya berkisar pada bantuan ekonomi, tetapi juga mengenai pelatihan militer, dukungan dalam proses perdamaian yang tidak seimbang. Propaganda melalui media sering kali dilakukan karena wadah yang penting untuk menyalurkan tujuannya yang ingin dicapai. Hal ini sungguh berkebalikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Tindakan SPLA yang kejam karena telah melakukan pencurian, perampokan, penculikan dan pemerkosaan secara besar – besaran merupakan suatu perilaku yang tidak boleh dilindungi.

Kebijakan Amerika Serikat ini selalu didasarkan pada ketidaksukaanya

modern, kemudian didukung dengan kebijakannya yang cenderung pro ke negara Muslim.

Usman Al Said, seorang Utusan Khartoum di Uni Afrika menyatakan Washington selalu menekan pemerintahnya baik dalam konflik di selatan maupun di Darfur yang berkembang baru – baru ini dikarenakan tidak menyukai kebijakan – kebijakan Sudan. Ini termasuk sikap anti Amerika dalam berbagai isu Arab yang menonjol seperti Invasi Irak dan konflik Israel - Palestina. Pemerintah AS menggunakan krisis Darfur untuk menjatuhkan pemerintahan Sudan, atas tuduhan pelanggaran HAM. Dikatakan intervensi Barat ini dapat memecah belah Sudan, sebuah negara penghasil minyak serta mendestabilisasi negara – negara yang bertetangga dengannya.

Tema yang dibawa oleh AS adalah hak asasi manusia. Muncul klaim AS sebagai tokoh HAM yang berhak menentukan standar serta menjatuhkan sanksi kepada negara lain yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Taktik inilah yang digunakan untuk mengintervensi negara – negara yang berhaluan islam maupun negara yang mayoritas warganya umat muslim.

Masih berkaitan dengan HAM, isu global yang disebarkan antara lain umat islam dicap sebagai umat yang kejam, tidak berperikemanusiaan, teroris, serta diskriminatif terhadap umat agama lain dan kaum perempuan. Hukum islam sering disimbolkan sebagai hukum pidana yang kejam dan tidak memperhatikan visi kemanusiaan, seperti hukum rajam, potong tangan, cambuk dan lain – lain.

Mengenai Sudan sebagai *state sponsored terrorism* selalu menjadi wacana AS ketika menerapkan kebijakan luar negerinya. Pemberian suaka terhadap tokoh

bagi Sudan. AS tidak pernah mau menghapuskan citra ini, walaupun Sudan telah memutuskan hubungan dengan Osama. Kondisi ini diperparah dengan adanya berbagai macam kamp - kamp pelatihan kelompok islam fundamentalis, seperti *Markaz Al Aqsa Lil Ilam, Jamiyah Al Quds, Harakah Al Mukawwamah Al Islamiyah / HAMAS dan PLO*. Organisasi yang mendapat pengakuan dari [pemerintah Sudan hanyalah PLO.

Penekanan kebijakan luar negeri pada perang melawan terorisme disatu pihak mendapatkan dukungan yang tinggi dari public AS yang mengalami trauma akibat serangan teroris tanggal 11 September 2001. Di sisi lain, kebijakan Presiden Bush ini menuai kritik baik dari dalam maupun luar negeri. Kritikan tersebut muncul karena : *Pertama*, Semakin meningkatnya kecenderungan Amerika Serikat tidak memperhatikan keperluan dan opini negara – negara lain. Amerika Serikat berperilaku sekehendak hati terhadap perjanjian dan koalisi internasional.

Kedua, Perang melawan terorisme merupakan prioritas dari Amerika dan mengacaukan tatanan hubungannya dengan beberap negara seperti Mexico(masalah imigarsi), Rusia dan Cina (masalah HAM), Pakistan dan negar – negar Asia Tengah.

Ketiga, Amerika Serikat berusaha mencapai tujuannya sendiri dengan mengorbankan issue internasional, meskipun para pejabat AS menyatakan bahwa hal tersebut *inaccurate*.

Deputi Menlu Richard Armitage dan penasehat keamann Condoleeza Rice menyampaikan Amerika Serikat tetap terlibat dalam berbagai urusan global

Spanyol dan Maroko atas Pulau Parsley, konflik Sudan, ketegangan antar India dan Pakistan dan promosi bab baru perundingan perdagangan bebas. Namun demikian, persepsi mengenai disengagement AS tersebut tetap berkembang.

Terlepas dari itu semua, hal mendasar yang harus difahami adalah AS telah mengubah politik luar negerinya sejak pasca perang dunia kedua. Bentuk kebijakan luar negeri intervensionis dengan mengangkat isu – isu global seperti HAM, demokrasi, globalisasi, dan terorisme.

Untuk meraih tujuannya sebagai pemimpin dunia AS telah memanfaatkan organisasi – organisasi internasional maupun regional untuk mengeluarkan keputusan – keputusan yang berhubungan dilaksanakan sesuai dengan kehendak AS. Organisasi utama, pem-back up AS dengan masalah politik, ekonomi, militer, keamanan dan sosial budaya. Semuanya adalah PBB dan organisasi lainnya yang berada berpayung dibawahnya.

Kajian dalam skripsi ini membahas permasalahan seputar dinamika politik luar negeri Amerika Serikat, terutama menyakut persepsi dan sifatnya yang intervensionis. Teknik propaganda dalam komunikasi massa juga diangkat untuk menekankan bentuk atau tahapan intervensi AS. Diplomasi juga merupakan media AS untuk mengemas keterlibatan dalam konflik, melalui para utusan khusus.

Sebagai obyek studi, kawasan Afrika, yaitu Sudan. Kawasan ini dirasa sangat menarik karena secara politik maupun geografis menempati dua kawasan yaitu Timur Tengah dan Afrika. Selain itu kajian untuk kawasan Afrika selama ini masih sedikit. Kondisi negara Afrika pada umumnya dan Sudan pada khususnya

agama, serta di beberapa negara banyak yang mengidap penyakit HIV dan AIDS seharusnya membuka ruang – ruang ide bagi para peneliti.

Kajian ini memperlihatkan kenyataan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat selalu penuh dengan intrik dan tipu daya. Bantuan yang dibungkus dengan tema untuk korban perang bertujuan untuk menghindarkan mereka dari bahaya kelaparan dan malnutrisi tetapi malah secara terang – terangan menjadi sumber dana pemberontak. Upaya AS dalam perdamaian, hanya untuk mendukung kelompok oposisi. Satu sikap yang tidak ideal dan *unbalanced*.

Tuduhan AS bahwa pemerintah Sudan telah melanggar HAM dalam krisis Darfur dan membela milisi janjaweed sangat berseberangan dengan tindakan Amerika Serikat yang memiliki kebijakan membela SPLA, pemberontak yang sangat kejam di Selatan. Diakui ataupun tidak, semua kesempatan, ruang, waktu dan media dikuasai hanya untuk melanggengkan posisinya sebagai Pemimpin